

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran dan Perencanaan terhadap sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Kabupaten Lampung Utara.

Sampel dalam penelitian ini adalah Komite Badan Anggaran (DPRD), Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang yang berkaitan dengan mengatur Penganggaran SKPD. Mendapatkan data dengan menggunakan purposive sampling, dimana jumlah responden penelitian ini 83 orang. Pengumpulan data dengan metode kuesioner disebarkan ke setiap SKPD di Kabupaten Lampung Utara. Analisis digunakan untuk menguji dampak dengan menggunakan Regresi linier untuk setiap variabel.

Hasil penelitian merujuk bahwa Pertama, Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan  $Y$  tingkat signifikan = 0,601 (60,1%). Kedua, Politik Penganggaran tidak berpengaruh positif signifikan terhadap terhadap sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan  $Y$  tingkat signifikan = 0,587 (58,7%). Tiga, Perencanaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan  $Y$  tingkat signifikan = 0,019 (1,9%).

Kata Kunci :

Kapasitas sumber daya manusia, politik penganggaran, perencanaan, sinkronisasi, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).